

URGENSI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BINTAN

Oleh

**Joy Lunavitta Lubis
NIM. 2105040110**

ABSTRAK

Pekerja Bukan Penerima Upah merupakan kelompok pekerja informal yang umumnya bekerja secara mandiri dan tidak memiliki hubungan kerja formal dengan pemberi kerja. Di Kabupaten Bintan, Pemerintah Daerah telah mengambil langkah progresif dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penyusunan Peraturan daerah tentang Pekerja Bukan Penerima Upah dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan landasan teori perundang-undangan dari Hans Kelsen, yang memandang sistem hukum sebagai tatanan norma yang berjenjang dan tersusun secara hierarkis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta wawancara sebagai pendukung hasil yang di dapatkan dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan Perda menyebabkan pelaksanaan program jaminan sosial bagi BPU masih bersifat sektoral, tidak merata, dan belum mampu menjangkau seluruh pekerja rentan secara menyeluruh. Selain itu, implementasi Peraturan Bupati juga masih menghadapi kendala, khususnya dalam hal keterbatasan anggaran dan koordinasi antarinstansi pelaksana. Oleh karena itu, penyusunan Perda dinilai sangat mendesak untuk memperkuat regulasi, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja BPU di Kabupaten Bintan.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pekerja Bukan Penerima Upah, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kabupaten Bintan.

**THE URGENCY OF FORMULATING A REGIONAL REGULATION ON
NON-WAGE RECIPIENT WORKERS IN THE IMPLEMENTATION OF
THE EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY PROGRAM IN BINTAN
REGENCY**

By

Joy Lunavitta Lubis

NIM. 2105040110

ABSTRACT

"Non-Wage Workers are a group of informal workers who generally work independently and do not have a formal employment relationship with employers. In Bintan Regency, the local government has taken progressive steps by issuing Regent Regulation Number 55 of 2022 concerning Guidelines for Participation in the Social Security Program for Vulnerable Workers. This research aims to analyze the urgency of drafting a regional regulation on Non-Wage Workers in the implementation of the social security program for workers in Bintan Regency. The method used is a normative-empirical approach based on the legislative theory of Hans Kelsen, which views the legal system as a hierarchical order of norms. Data collection techniques were conducted through literature studies and interviews as supporting evidence obtained from relevant agencies. The research results indicate that the absence of a regional regulation causes the implementation of the social security program for Non-Wage Workers to remain sectoral, uneven, and unable to reach all vulnerable workers comprehensively. Furthermore, the implementation of the Regent Regulation also faces challenges, particularly in terms of budget limitations and coordination among implementing agencies. Therefore, the drafting of a regional regulation is deemed urgent to strengthen regulations, provide legal certainty, and enhance the effectiveness and sustainability of labor protection for Non-Wage Workers in Bintan Regency.

Keywords: Regional Regulation, Non-Wage Workers, Social Security for Workers, Bintan Regency.